

Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Citra Polisi Pada Kepolisian Resort Kota Pontianak

Wantini

**Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura
Email : wanty_nugroho@yahoo.co.id**

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan tentang Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Citra Polisi Pada Kepolisian Resort Kota Pontianak berdasarkan analisis SWOT yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Selanjutnya terkait tentang bagaimana meningkatkan citra kepolisian dalam mengatasi tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab oleh beberapa aparat polisi yang berdampak buruk pada citra Kepolisian Resort Kota Pontianak, tentu perlu adanya pencitraan kepolisian yang dilakukan dengan strategi hubungan masyarakat secara internal seperti penindaklanjutan kesalahan/pelanggaran oknum dengan memberikan pengarahan, peringatan sampai dengan pemberian sanksi-sanksi pada oknum polisi tersebut.

Kata Kunci : Citra Buruk Polisi, Pencitraan Kepolisian, Strategi Hubungan masyarakat.

Abstract

This research depict about Strategy of Public Relations of In Improving Police Image of at Police of Resort of Town Pontianak of pursuant to analysis SWOT that is Strength, Weakness, Opportunity and Threats. Related about how to improve the police image in overcoming irresponsible action by some apparatus police affecting ugly at image of police of resort of town pontianak, of course need the existence of police image conducted with the strategy of public relations internally like follow-up mistake or collision a person by giving guidance, commemoration of up to sanction gift of at the a person at police.

Keywords : Ugly Image of Police, Police Image, Strategy of Public Relations.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian yang menentukan pembangunan hukum adalah kepolisian. Polisi merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Anggota dari Polisi merupakan anggota masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan masyarakat umum. Keberadaan polisi sangat erat kaitanya dengan masyarakat, karena masyarakat yang memiliki pengaruh paling besar dan merupakan target utama dalam memberikan pelayanan kepada mereka.

Oleh karena itu dibutuhkan peran aparat keamanan. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepolisian dibentuk sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta memberikan pelindung, penganyom dan pelayanan

bagi masyarakat dalam rangka terciptanya keamanan. Sebagai penegak hukum, polisi bekerja berdasarkan asas dan badan hukum yang berlaku.

Peranan lembaga kepolisian sangat strategis dan penting dalam pembangunan dan penegakkan hukum. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang mendukung masyarakat madani yang adil dan makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kenyataannya fungsi kepolisian belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Masih banyaknya oknum kepolisian menyalahgunakan status sebagai aparat, yang seharusnya memberikan rasa aman dan selalu melindungi masyarakatnya justru sering melakukan

tindakan kekerasan seperti penembakan kepada mahasiswa, penganiayaan kepada orang yang belum tentu bersalah, perkelahian sesama aparat, menggunakan narkoba dan masih banyak lagi tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Hal ini memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, sehingga citra kepolisian di mata publik pun tidak baik pula, yang menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Sama halnya yang terjadi di Kepolisian Kalimantan Barat. Kasus-kasus yang dilakukan beberapa oknum kepolisian yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini seperti pelanggaran kode etik, ikut serta sebagai tindak pelaku kejahatan dan kasus-kasus lainnya yang terditeksi maupun tidak secara umum diketahui masyarakat.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi tersebut tentunya akan sangat memperburuk citra dari para aparat kepolisian dipandangan masyarakat. Bahkan beberapa aparat tersebut mengancam masyarakat untuk memberikan keterangan tentang mereka yang ikut terlibat. Berdasarkan hal ini masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian beranggapan aparat kepolisian telah memanfaatkan statusnya, yang seharusnya mempunyai tugas melindungi, tetapi membuat masyarakat merasa takut untuk berhubungan kepada para aparat kepolisian.

Kendala-kendala yang terjadi dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan identifikasi masalah berdasarkan permasalahan-permasalahan yang secara umum digambarkan dalam latar belakang di atas yakni meliputi :

1. Strategi kehumasan secara internal yang ditempuh oleh bagian Humas POLRESTA dalam meningkatkan citra institusi kepolisian di wilayah POLRESTA Pontianak.
2. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat yang tidak bertanggungjawab mengakibatkan buruknya citra dari kepolisian.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yakni tentang “Strategi kehumasan internal bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Pontianak dalam memperbaiki citra polisi di Kota Pontianak”.

Rumusan masalah yang nantinya akan memberikan gambaran pada pembahasan dalam penelitian ini, yakni “*Bagaimana strategi kehumasan internal bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Pontianak dalam menjelaskan citra polisi di Kota Pontianak?*”.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai Analisis SWOT dalam menciptakan strategi yang dikemukakan oleh (Rangkuti, 1997:19) untuk dijadikan sebagai aspek penelitian, karena teori tersebut dinilai sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab masalah penelitian yang akan diteliti, yaitu “Untuk mengetahui sejauh mana Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity and Threats*) dapat mengevaluasi strategi kehumasan internal bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Pontianak dalam menjelaskan citra polisi di Kota Pontianak”

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis situasi suatu organisasi atau perusahaan dilihat dari faktor-faktor kekuatan (*strengths*) atau kelemahan (*weaknesses*) dari internal, dan faktor-faktor peluang (*opportunities*) atau ancaman (*threats*) dari eksternal.

Teknik yang biasa digunakan adalah teknik penyusunan strategi dengan menggunakan strategi matrik kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Matrik SWOT berdasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan sumber daya unggulan organisasi atau faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Matrik SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi pada empat kwadran yang saling terkait dan fokus kearah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi, seperti tabel matrik berikut.

Analisis SWOT adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengadakan perubahan dalam manajemen suatu organisasi (*change management*) secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun pada saat bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 1997:19).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini

melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Adapun Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan suatu bagian dari strategi perusahaan guna mendapatkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu keberadaan humas sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan agar dapat membantu pandangan yang positif dari *stakeholders* terhadap perusahaan.

Pengertian humas, dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang positif, terencana, bertujuan untuk mempengaruhi, mendapat pengertian dan terpercaya, sehingga dapat merubah suatu citra negative menjadi citra positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menuliskan tentang masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Penelitian ini mengungkapkan apa adanya dari kenyataan yang ada di lapangan pada saat kegiatan peneliti lakukan.

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus terjun kelapangan dan berada disana dalam waktu yang cukup lama. Apa yang dilakukan oleh peneliti

kualitatif banyak persamaannya dengan detektif atau mata-mata, penjelajah, atau jurnalis yang juga terjun ke lapangan untuk mempelajari manusia tertentu dengan mengumpulkan data yang banyak. Dalam penelitian ini dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan bagaimana strategi hubungan masyarakat dalam meningkatkan citra polisi pada Kepolisian Resort Kota Pontianak.

Adapun lokasi penelitian yakni Kepolisian Resort Kota Pontianak, terletak di jalan Johan Idrus Nomor 1. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena berdasarkan masalah yang diteliti oleh peneliti yakni berkaitan dengan opini masyarakat tentang citra Kepolisian Resort Kota Pontianak itu sendiri yang mana secara garis besar pandangan masyarakat masih didominasi dengan penilaian negatif terhadap kinerja dan perilaku kepolisian secara umum.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan banyak hal yang telah dikemukakan seperti mengetahui jumlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian khususnya kepolisian yang bertugas dan bernaung dalam struktur kepolisian Resort Kota Pontianak. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan terkait sanksi yang diberikan oleh jajaran pemimpin Kepolisian Resort Kota Pontianak guna menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian itu sendiri, sehingga akan terdapat sebuah hubungan keterkaitan dengan citra kepolisian itu sendiri.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Ps. PA Urmin Polresta Pontianak sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Kasubbag Humas dan Bagian Propam Polresta Pontianak sebanyak masing-masing 1 (satu) orang.
- c. Masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Pontianak sebanyak 15 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pencitraan Kepolisian

Faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita untuk memanfaatkannya. Yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dari kepolisian Resort Kota Pontianak yaitu mengacu pada petunjuk teknis yang sudah dibuat oleh kepolisian setempat. Setiap tugas yang diberikan harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber dari pihak Polresta Pontianak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut hasil wawancara dengan AKP Slamet Wagino selaku Kasubbag Humas Polresta Kota Pontianak menyatakan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dan diketahui secara eksternal akan langsung dilakukan konfrensi pers. Konfrensi pers ialah suatu kegiatan humas Polri untuk menyampaikan pernyataan atau informasi yang terkait dengan permasalahan aktual dengan menghadirkan media massa untuk dipublikasikan ke masyarakat luas. Selain itu juga terjalin kerjasama dengan komisi informasi pusat atau daerah dan komisi informasi pusat atau daerah adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan ikatan atau perjanjian serta kesepahaman antara Polri dan komisi informasi dalam setiap layanan informasi yang disampaikan kepada Polri maupun komisi informasi yang disampaikan kepada Polri maupun komisi informasi terhadap penanganan persoalan informasi maupun permasalahan informasi (penyelesaian sengketa informasi).
- b. Menurut hasil wawancara dengan Pengtu Herlinda P. selaku PA Urmin Polresta Kota Pontianak menyatakan bahwa pengawasan terhadap tugas yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh KOMPOLNAS (Komisi Polisi Nasional) fungsinya yaitu menilai kinerja kepolisian. Sedangkan yang memberikan penilaian tentang tugas yang telah dilaksanakan oleh aparat kepolisian yaitu Bidang Propam yang bertugas untuk menilai ada atau tidak terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Tugas yang telah dilakukan akan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing Kasat Wil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber dari masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan bapak Ramli yang sedang melakukan pembuatan SIM di Polresta Pontianak, terkait pelayanan mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur dirasakan cukup memakan waktu yang cukup lama. Beliau menambahkan terkait dengan pencitraan polisi, pelayan juga menjadi hal yang harus diperhatikan agar masyarakat

menilai bahwa tugas polisi sebagai pemberi pelayanan masyarakat bisa sesuai.

2. Wawancara dengan ibu Nuranti yang sedang melakukan pelaporan tindak kejahatan mengatakan bahwa agar pencitraan kepolisian dapat dianggap baik maka polisi harus cepat dalam menanggapi laporan-laporan dari masyarakat dan menindak cepat laporan-laporan masyarakat terkait tindak kejahatan tersebut.

2. Strategi Meningkatkan Citra

Situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Dalam hal ini ada beberapa kekuatan yang dijadikan landasan dalam Humas di Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Dalam setiap tugasnya, ada empat langkah yang sebaiknya dilakukan oleh setiap praktisi Hubungan Masyarakat (Humas), yaitu: *fact finding, planning and programming, communication, dan evaluation*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber dari pihak Polresta Pontianak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut hasil wawancara dengan AKP Slamet Wagino selaku Kasubbag Humas Polresta Kota Pontianak menyatakan bahwa di Polresta terdapat Badan koordinasi kehumasan, yaitu salah satu bentuk pertemuan kehumasan lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan koordinasi secara rutin untuk saling menyampaikan pesan maupun informasi. Beliau menegaskan perlu adanya komunikasi tatap muka untuk mengarahkan para aparat kepolisian. Komunikasi tatap muka adalah penyampaian pesan atau informasi secara langsung dari pejabat Humas Polri kepada anggota Polri dan PNS Polri yang berisi Undang-Undang, peraturan, kebijakan, petunjuk, perintah untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan. Selain itu juga beliau menambahkan dalam mengatasi masalah pencitraan yang dilakukan oleh beberapa aparat kepolisian harus disikapi secara bijaksana demi tercapai penyelesaiannya. Kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi.
- b. Menurut hasil wawancara dengan Pengtu Herlinda P. selaku PA Urmin Polresta Kota Pontianak menyatakan bahwa terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam

pelaksanaan tugas oleh aparat dikarenakan tidak adanya pengertian mengenai Petunjuk Teknis dan surat tugas yang telah diberikan. Mengatasi pelanggaran yang dilakukan agar tidak terulang kembali yaitu dengan memberikan training atau sebelum melaksanakan tugas diberikan pengarahan, mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan tidak dilakukan yang mengacu kepada Petunjuk Teknis dan Surat Tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber dari elemen masyarakat terkait strategi meningkatkan citra kepolisian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan bapak Ramli menyatakan bahwa kepolisian harus lebih melakukan pendekatan kepada lapisan masyarakat, selain itu pula dalam upaya pencitraan keluar hal-hal positif yang disampaikan harus sejalan dengan realita yang sebenarnya, sebagai contoh penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum atau pun masyarakat yang di anggap khusus bentuk penindakannya diberikan tanpa ada pandang bulu dan tetap harus mendapat hukuman yang tegas dan adil.
2. Wawancara dengan ibu Nuranti menyatakan bahwa lembaga kepolisian berbenah kedalam institusi agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum dapat dikurangi, sehingga citra kepolisian akan semakin baik dengan sendirinya, selain itu juga polisi harus lebih tegas menangani setiap tindak kejahatan baik itu yang dilakukan masyarakat umum maupun yang dilakukan oleh oknum mereka sendiri tanpa melihat status oknum tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis tentang strategi hubungan masyarakat meningkatkan citra polisi pada Kepolisian Resort Kota Pontianak adalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencitraan Kepolisian

Jika terjadi suatu pelanggaran perlu adanya komunikasi tatap muka untuk mengarahkan para aparat kepolisian dalam mengatasi masalah pencitraan yang dilakukan oleh beberapa aparat kepolisian yang nantinya disikapi secara bijaksana demi tercapai penyelesaiannya. Dalam tubuh kepolisian yang dilakukan oleh seorang praktisi humas nantinya harus mampu membuat perbaikan perencanaan disesuaikan dengan pengembangan

kondisi di lapangan. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas oleh aparat dikarenakan tidak adanya pengertian mengenai Petunjuk Teknis dan surat tugas yang telah diberikan. pengawasan terhadap tugas yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh KOMPOLNAS (Komisi Polisi Nasional) fungsinya yaitu penilai kinerja kepolisian.

2. Strategi Meningkatkan Citra

Dalam setiap tugasnya, ada empat langkah yang sebaiknya dilakukan oleh setiap praktisi Hubungan Masyarakat (Humas), yaitu: *fact finding, planning and programming, communication*, dan *evaluation*. (3). *Opportunities* yang terdapat pada kepolisian Resort Kota Pontianak bahwa landasan dalam pelaksanaan tugas dari kepolisian Resort Kota Pontianak yaitu mengacu pada petunjuk teknis yang sudah dibuat oleh kepolisian setempat, sehingga adanya pelanggaran yang terjadi dapat segera diketahui. Setiap pelanggaran yang terjadi dan diketahui secara eksternal akan langsung dilakukan konferensi pers untuk klarifikasi dan aparat yang melakukan pelanggaran diperkenankan menyusun hak jawab atau pembelaan adalah hak aparat memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan atas nama baiknya. Pengaruh masyarakat luar dan para *stakeholder* serta adanya perubahan kebijakan elit politik serta kurangnya tingkat pendidikan dari aparat itu sendiri dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran ditambah dengan maraknya pemberitaan yang memberikan gambaran tentang buruknya pencitraan dari kepolisian. Sehingga diperlukan Memerlukan komitmen moral diantara masing-masing pihak yang terkait dengan pembinaan SDM Polri untuk mampu dan mau menjalankan proses pembinaan SDM secara transparan, integritas, akuntabel, dan profesional. Serta ada sanksi hukum bagi pihak yang melanggar komitmen moral tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dalam perbaikan strategi hubungan masyarakat meningkatkan citra polisi pada Kepolisian Resort Kota Pontianak yaitu : (1). Disarankan membentuk dan mengoptimalkan lembaga Assessment Centre sebagai wadah pengawasan dan pengendalian pembinaan karier personel Polri. (2). Perlunya disiapkan kelengkapan yang berhubungan kegiatan Humas untuk mengangkat pencitraan kepolisian ditengah-tengah masyarakat. (3). Berhubung Subbag Humas Ops Polres merupakan struktur yang baru sehingga diperlukan pelatihan yang berhubungan dengan PID (pengelola informasi dan dokumentasi) agar

personel Humas memahami tugas dan perannya masing-masing. (4). Hak prerogatif pimpinan tidak sewenang-wenang dijadikan dasar untuk menentukan kelulusan personel yang akan mengikuti pendidikan, namun harus menghargai proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan memperhatikan kualitas peserta seleksi, tidak sekedar memperhatikan aspek senioritas dan jabatan saja. (5). Pembinaan SDM diarahkan pada asas keadilan, manfaat, dan profesionalisme personel Polri, sehingga tumbuh motivasi dan kompetisi para personel Polri untuk meraih prestasi bagi keberhasilan organisasi.

REFERENSI

- Anggoro, M. Linggar. 2002. *Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Chrysnanda. 2009. *Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani*. Jakarta : Penerbit YPKIK.
- David, F.R. 2004. *Manajemen Strategis, Konsep-Konsep*. Jakarta : Penerbit PT. Indeks.
- Djanalis, Djanaid. 1993. *Public Relations Dalam Teori dan Praktek Indonesian Purels Training Edisi VII (Revisi)*. Malang.
- Effendi, Onong U. 2002. *Hubungan Masyarakat (Studi Komunikasi Logis)*. Jakarta.
- Kasali, Rhenald. 1994. *Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Pustaka Utama Grafiti.
- Kunarto. 1995. *Merenungi Kritik Terhadap Polisi*. Jakarta : Penerbit Cipto Manunggal.
- Kusumastuti, Frida. 2002. *Dasar-Dasar Humas*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2000. *Human Communication Konteks-Konteks Komunikasi*. Bandung : Penerbit PT. Remaja Rosda Karya.
- Muradi. 2009. *Penantian Panjang Reformasi Polri*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Rachmadi, F. 1994. *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Membangun Polisi Sipil; Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Penerbit PT. Kompas Media Utama.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persadax.
- , 2006. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persadax.
- Sianipar dan HM, Entang. 2003. *Teknik-Teknik Analisis Manajemen*. Jakarta : Penerbit Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Soemirat, Soleh dan Ardianto, Elvinora. 2002. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung : Penerbit Remaja Rosda Karya.
- Summaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta : Penerbit Kinisius.
- Sutanto. 2005. *Refleksi Pemikiran "POLRI Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra"*. Jakarta : Penerbit KIK UI Press.
- Wasesa. Silih Agung. 2005. *Strategi Public Relations : Perspektif 34 Merek*. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Widjaja. A. W. 1997. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Rangkuti, Freddy. 1997. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A.Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : WANTINI
NIM / Periode lulus : ED1107116
Fakultas/Jurusan : ISIP / IA
E-mail address/HP : Wanty-nugroho@yahoo.co.id / 085252084909

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Citra Polisi Pada Kepolisian Resort Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

[Signature]

NIP.

Dibuat di :
Pada tanggal:

[Signature]

(WANTINI)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).